PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
(Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat)

SKRIPSI

Nama : Puspa Erika Karolina

NIM : 222015111

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
(Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Puspa Erika Karolina

NIM : 222015111

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern* Terhadap Pencegahan *Fraud* (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat)
Nama	: Puspa Erika Karolina
Nim	: 222015111
Fakultas	: *Ekonomi dan Bisnis*
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Pemeriksaan Akuntansi II

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2018

Pembimbing I,

Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM : 0226016901/765380

Pembimbing II,

Aprianto, S.E, M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

BETRI, S.E.,M.Si., Ak.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Puspa Erika Karolina
Nim	: 22 2015 111
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Studi	: Pemeriksaan Akuntansi II

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakkan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,

Puspa Erika Karolina

ABSTRAK

Puspa Erika Karolina/222015111/2019/Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat). Tujuannya untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat. Variabel yang digunakan adalah sistem pengendalian intern dan pencegahan *fraud*. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya dilanjutkan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS).

Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, *Fraud*

ABSTRACT

Puspa Erika Karolina/222015111/2019/The Influence of Internal Control System Implementation on Fraud Survey Prevention in Regional Work Unit Kapubaten Lahat

The objective of this study was to answer of how big the influence of internal control system implementation on fraud survey prevention (survey in regional work unit Kabupaten Lahat) in order to find out the influence of internal contol system implementation o fraud survey prevention (survey in regional work unit kabupaten lahat). This study was associative research. The data used in this study was primary and secondary data. The technique for collecting the data used in this study was by using questionnaire. The sampling method used in this study was simple random sampling. The methods of analyzing the data used in this study were quantitative method and qualitative method by using simple multiple linear regression. Furthermore, the partial hyphotesis test (t test) was conducted. The data analysis technique in this study was assisted by the Statistical Program For Special science (SPSS). The results of the analysis showed that the internal control system gave a significant influence on prevention of fraud in the regional work unit Kabupaten Lahat.

Keywords *: Internal control system, Fraud*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrobbil alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang, dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda Syamris M. Yakin S.E dan Ibunda Discik Khilayana yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat, dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi,SE.,M.Si., Ak.,CA selaku pembimbing I dan Bapak Aprianto, S.E, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli,S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin., S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Saudaraku Dita Sarvika Wulanti, Disarti Krispa Anggraini dan Ricky Alfaresi Sanggomaro.
6. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 .
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lahat yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesai penyusunaan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 2019

Penulis

Puspa Erika Karolina

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xi**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xvii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **10**
- **C. Tujuan Penelitian** **10**
- **D. Manfaat Penelitian** **10**

BAB II. KAJIAN PUSTAKA **12**

- **A. Landasan Teori** **12**
  - **1. Sistem Pengendalian Intern** **12**
    - a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 12
    - b. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern 15
  - **2. *Fraud* (kecurangan)** **25**
    - a. Pengertian *Fraud* 25
    - b. Pengukuran Pencegahan *Fraud* 28
- **B. Kerangka Pemikiran** **33**
- **C. Hipotesis** **41**

BAB III. METODE PENELITIAN **42**

- **A. Jenis Penelitian** **42**
- **B. Lokasi Penelitian** **43**
- **C. Operasionalisasi Variabel** **43**

D. Populasi dan Sampel **44**
E. Data yang Diperlukan **47**
F. Metode Pengumpulan Data **48**
G. Metode Pengujian Data **49**
H. Analisis Data dan Teknik Analisis **51**
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **60**
A. Hasil Penelitian **60**
1. Profil Responden **60**
2. Tingkat Pengembalian Kuesioner **62**
3. Pengujian Data **63**
a. Uji Validitas 63
b. Uji Reliabilitas 66
4. Analisis Statistik Deskriptif **66**
a. Analisis Statistik Deskriptif Per Variabel 66
b. Statistik Deskriptif Per Indikator Per Variabel 68
5. Analisis Asosiatif **78**
a. Uji Asumsi Klasik 78
b. Uji Regresi Linier Sederhana 80
c. Koefisien Determinasi 82
6. Uji Hipotesis **82**
a. Uji Parsial (Uji t) 82
B. Pembahasan Hasil Penelitian **84**
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN **93**
A. Simpulan **93**
B. Saran **93**
DAFTAR PUSTAKA **95**
LAMPIRAN **99**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, karena tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut perusahaan dapat bersaing dengan sehat. Salah satu usaha untuk menciptakan ketahanan dan daya saing bagi perusahaan ialah dengan membentuk sistem pengendalian intern yang dapat membantu pihak manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi resiko kecurangan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur pencegahan *fraud* (Diaz, 2013: 196).

Di Indonesia perkembangan menarik terjadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan diberi amanat untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dan ketentuan lain yang menjabarkan menyebutkan bahwa sistem

pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pada tanggal 28 Agustus 2008 telah dimulai babak baru pembaharuan pengelolaan organisasi di instansi pemerintah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam Undang-undang tersebut mengisyaratkan perlunya sistem pengendalian intern pemerintah yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang diarahkan oleh dewan direksi, manajemen dan personal perusahaan lainnya berupa metode, kebijakan prosedur atau praktik lainnya untuk memberikan jaminan yang cukup agar tujuan berikut ini tercapai proses operasi yang efektivitas dan efisiensi, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan ketaatan pada hukum dan peraturan (Winwin dan Abdulloh, 2017: 107).

Menurut Mahmudi (2016: 251) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen eksekutif dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Theodorus (2013: 129) komponen sistem pengendalian intern terdiri dari lima yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, kegiatan pengendalian dan pemantauan.

Badan Pemeriksa Keuangan (2018) berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018 mengungkap 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan untuk pemerintah daerah, BUMN dan Badan lainnya ditemukan sebanyak 6.541 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern.

Seperti halnya berita yang dikutip dari kompas.com pada tahun 2016 Tjahjo Menteri Dalam Negeri mengungkapkan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi terjadi karena masih lemahnya sistem tata kelola pemerintahan dan faktor kelemahan sistem pengendalian internal seperti masih adanya kemungkinan kesempatan dan ketidaktahuan juga mempengaruhi masih adanya tindak korupsi. Permasalahan yang serupa dikemukakan Bahdin (2014) Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian hasil penelusuran Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) lemahnya pengendalian intern menjadi salah satu penyebab timbulnya korupsi dalam pemerintahan.

Sama halnya berdasarkan laporan Indonesia *Coruption Watch* tahun 2018 tren kasus korupsi meningkat dari tahun 2016 kasus korupsi yang terjadi hanya 482 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 1,4 Triliun sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 576 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 6,5 Triliun. Berdasarkan laporan ICW Pemerintah Kabupaten merupakan lembaga yang paling banyak terlibat kasus korupsi.

Moermahadi (2015) dikutip dari viva.co.id menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan terhadap keuangan Pemprov Jatim 2014 hanya mendapat penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan oleh permasalahan pengendalian internal SKPD masih ditemukan kelemahan pengendalian kas. Temuan realisasi pertanggungjawaban belanja barang dan jasa senilai Rp 21,56 miliar kepada 23 SKPD yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Anggaran sebesar Rp 31,45 miliar kepada sepuluh SKPD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir (2016) Modus korupsi yang paling banyak terjadi yaitu penggelapan yang terdiri dari 132 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 518 miliar. Penggelembungan anggaran (*mark-up*) sebanyak 110 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 448 miliar. Muncul juga praktik suap

untuk mendapatkan proyek di sektor pendidikan sebesar Rp 55 miliar yang banyak melibatkan pegawai dan kepala dinas pendidikan. Kajian KPK pada 2014 menyebutkan bahwa akar permasalahan pengelolaan anggaran pendidikan disebabkan oleh 4 empat faktor, salah satunya lemahnya pengendalian internal.

Permasalahan *fraud* dengan semakin berkembangnya bisnis, maka tugas manajemen untuk mengendalikan perusahaan menjadi semakin berat. Terdapat ketidakpastian atau risiko termasuk *fraud*, yang dapat mengganggu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan manajemen. Oleh karena itu, manajemen perlu mengadakan sistem pengendalian intern yang baik dan efektif. Riset membuktikan bahwa sistem pengendalian internal dan akuntabilitas yang baik dapat mengurangi terjadinya *fraud* ataupun korupsi (Subagio dkk, 2013: 117)

Menurut Karyono (2013: 4) *Fraud* atau kecurangan merupakan suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun diluar organisasi.

Fenomena yang dapat kita lihat sebagai wujud dari *fraud* yang terjadi yaitu kasus *Phar Mor Inc* sebagai kasus *fraud* yang melegenda dikalangan auditor keuangan, dimana Dwisarjono (2014) menggungkap Eksekutif di *Phar Mor* secara sengaja melakukan *fraud* untuk mendapatkan keuntungan *financia*l yang masuk ke saku pribadi individu di jajaran top

manajemen perusahaan. Dalam melakukan *fraud*, top manajemen Phar Mor membuat 2 laporan ganda. Satu set laporan *inventory* berisi laporan *inventory* yang benar (*true report)*, sedangkan satu set laporan lainnya berisi informasi tentang *inventory* yang di *adjustment* dan ditujukan untuk auditor *use only*. Laporan lainnya adalah laporan yang telah dimanipulasi sehingga seolah-olah perusahaan mendapat keuntungan yang berlimpah sehingga utang-utangnya tidak ketahuan.

Menurut Diaz (2013: 103) adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan review atas kerentanan dan risiko *fraud*, *review gamemanship*, kecukupan dan efektivitas *corporate governance*, kewaspadaan komite audit, penegakan hukum Independensi auditor, komunikasi dengan dewan komisaris dan komite audit.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dimana pasal 2 untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya dikutip dari palembang.tribunnews pada tahun 2017 kasat reskrim polres Lahat, AKP Ginanjar menemukan adanya pungli di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat tiga tersangka kasus operasi tangkap tangan langsung dilakukan penahanan yakni kasi identitas kependudukan Idham Khalid, kasi pindah datang penduduk Abdurrozi dan Amirul Mukminin staf bidang pengurusan KTP dan KK barang bukti yang diamankan yakni uang tunai sebesar Rp 1.827.000. Jaksa Agung Prasetyo (2016) mengatakan, pungutan liar merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan bahkan pidana korupsi. Menurutnya, pungli termasuk penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara yang dapat dijerat pasal 12E UU perihal pemberantasan korupsi.

Rakhmat Surya (2017) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjelaskan ada sebanyak enam PNS di lingkungan Pemkab Lahat diberhentikan lantaran divonis bersalah atas tindak pidana korupsi. Serta yang diterbitkan oleh newshanter.com pada

tahun 2015 dua PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan latihan di kabupaten Lahat terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat tahun 2010 yang menyebabkan kerugian pada negara sebesar Rp 204.071.400 serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus kecurangan lainnya dikutip dari fornews.co pada tahun 2012 Pengadilan Tipikor memvonis dua terdakwa tindak pidana korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat keduanya dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah dan merugikan keuangan negara Rp 473.004.697. Keduanya terlibat proyek pengerjaan untuk tujuh kegiatan pada BPBD Kabupaten Lahat yakni penyediaan bahan logistik kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan pakaian khusus harian tertentu, sosialisasi peraturan perundang-undang, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan rencana kerja tahunan ini menggunakan dana lebih kurang Rp707.069.210.

Berbagai kecurangan yang terjadi umumnya dilakukan karena adanya peluang atau kesempatan. Peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan kurangnya loyalitas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh individu. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak dibatasi hanya pada bagian akuntansi dan keuangan, tetapi

meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan sebagainya (Ronald dan Ravli, 2017: 115).

Banyaknya temuan BPK yang berulang-ulang pada setiap tahun dengan kasus yang sama tentang lemahnya sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi masih tinggi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Diaz (2013: 69) korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi dan para pihak yang bekerja sama menikamati keuntungan (simbolis mutualisme).

Berbagai bentuk kecurangan tersebut harus diantisipasi oleh auditor dengan membuat sistem pengendalian intern untuk melindungi organisasi dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari organisasi. *Fraud* timbul selain karena adanya niat pelaku juga karena adanya kesempatan atau peluang *(opportunity)* yang dapat dieksploitasi oleh pelaku. Oleh karena itu tahap awal pencegahan *fraud* adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur (Diaz, 2016: 184).

Penelitian sebelumnya oleh Chairun Nisak dkk (2013) hasil penelitiannya diketahui bahwa lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* baik secara simultan maupun secara

parsial. Untuk mencegah terjadinya *fraud* perlunya komitmen dari pimpinan SKPD, sehingga pelaksanaan SPI dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu dkk (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*, implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud,* serta pengendalian intern kas dan implementasi *Good Governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* (survei pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Lahat).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* (survei pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Lahat).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Untuk mendapatkan data berkenaan penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi penulis tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*.

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat

   Dengan mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* dapat dijadikan sebagai masukan dan arahan dalam menentukan kebijakan operasional pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Muhammad Prasetyo. (2016). Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan. https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan. Diakses 11 Oktober 2018

Albrecht, W. Steve, Chad Albrecht, Conan Albrecht, Mark Zimbelman. (2011). *Fraud Examination*. CENCAGE Learning: USA.

Amin Widjaja Tunggal. (2016). *Kecurangan dan Pencegahan Kecurangan Fraud and Fraud Preventions*. Jakarta: Harvarindo.

Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Azuar Juliandi, Irfan dan Saprinal Manurung. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*: *Konsep dan Aplikasi.* Medan: UMSU PRESS.

Badan Pemeriksa Keuangan 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018

Bahdin. (2014). Lemahnya Pengendalian Internal Penyebab Korupsi. http://id.beritasatu.com/home/lemahnya-pengendalian-internal-penyebab-korupsi/99229. Diakses 6 Juli 2018

Bona P. Purba (2015). *Fraud dan Korupsi Pencegahan Pendeteksian dan Pemberantasan.* Jakarta: Lestari Kiranatama.

Warren, Carl S., James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf. (2017). *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Chairun Nisak, Prasetyono, Fitri Ahmad Kurniawan. (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kabupaten Bangkalan. *Jaffa*.01(1): 15-22

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control – Integrated Framework.* Diakses 9 April 2018. https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf_

Crain, Michael. A., William S. Hopwood Carl Pacini, George R. Young. (2015). *ESSENTIALS OF Forensic Accounting*. New York: American Institute of Certified Public Accountants.

Danang Sunyoto. (2014). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Diaz Priantara. (2013). *Fraud Auditing & Investigation.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Duwi Priyatno. (2016). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gaya Media.

Dwisarjono. (2014). Kasus Kecurangan Phar Mor Inc. https://www.kompasiana.com/nlk/kasus-kecurangan-audit-phar-mor-inc_58b92ca23493737310b31e88. Diakses 3 Maret 2017

Eka Ariaty Arfah. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Investasi* 7(2): 137-153

Fitrawansyah. (2014). *Fraud dan Auditing*. Jakarta*:* Mitra Wacana Media.

Ginanjar. (2017). Tiga Tersangka OTT di Disdukcapil Lahat Langsung Ditahan. http://palembang.tribunnews.com/2017/07/26/tiga-tersangka-ott-di-disdukcapil-lahat-langsung-ditahan. Diakses 11 Oktober 2018

Ida Bagus Dwika Maliawan, Edy Sujana, Putu Gede Diatmika. (2017). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (fraud). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8(2)

Indonesia Coruption Watch. (2018). Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017. https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017_0.pdf. Diakses 7 Desember 2018

Irham Fahmi. (2015). *Etika Bisnis Teori.* Yogyakarta: Alfabeta.

Joseph, Oguda Ndege., Odhiambo Albert, John Byaruhanga. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega Country. *International Journal of Business and Management Invention* 4 (1): PP.47-57

Karyono. (2013). *Forensic Fraud.* Yogyakarta: Andi Offset.

Luhut Binsar. (2018). Luhut Harap Kader Golkar Tak Ada yang Terjaring OTT KPK. https://news.okezone.com/read/2018/03/26/337/1877748/luhut-harap-kader-golkar-tak-ada-yang-terjaring-ott-kpk. Diakses 26 Maret 2018

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Moermahadi Soerja Djanegara. (2015). BPK Temukan Kelemahan Pengendalian Kas Pemprov Jatim. https://www.viva.co.id/berita/nasional/640130-bpk-temukan-kelemahan-pengendalian-kas-pemprov-jatim. Diakses 19 Juni 2015

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008) Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Putu Rita Saftarini, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati. (2015). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1* 3(1)

Rakhmat Surya Effendi. (2017). 7 PNS Diberhentikan Tidak Hormat. https://sumeks.co.id/7-pns-diberhentikan-tidak-hormat/. Diakses 12 Oktober 2018

Rezaee, Zabihollah., Richard Riley. (2010). *Financial Statement Fraud Prevention and Detection*. Canada: JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Rifki arialfa. (2017). Dua Terdakwa Korupsi di BPBD Lahat Divonis 1,6 Tahun Penjara. https://fornews.co/news/dua-terdakwa-korupsi-di-bpbd-lahat-divonis-16-tahun-penjara/. Diakses 25 Oktober 2018

Ronald Tehupuring dan Ravli Alvaro Lingga. (2017). Sistem Pengendalian Intern Sebagai Prediktor Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Dapatkah Loyalitas Individu Memitigasinya. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 3(2): 113 – 129

Rusman Soleman. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Fraud. *JAAI* 17(1): 57-74

Subagio Tjahjono, Josua Tarigan, Budi Untung, Jap Efendi, Yohana Hardjanti. (2013). *Business Crimes and Ethics.* Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukrisno Agoes. (2012). *Auditing Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Theodorus M. Tuanakotta. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing).* Jakarta: Salemba Empat.

Theodorus M. Tuanakotta. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.* Jakarta: Salemba Empat.

Tjahjo Kumolo. (2016). Mendagri Nilai Korupsi di Daerah Bisa Terjadi karena Kelemahan Sistem. https://nasional.kompas.com/read/2016/09/05/11540311/mendagri.nilai.korupsi.di.daerah.bisa.terjadi.karena.kelemahan.sistem. Diakses 24 April 2018

TMBooks. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Uma Sekaran. (2017*). Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang pemerintahan daerah.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 *tentang sistem pengendalian intern pemerintah.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Winwin, Abdulloh. (2017). *Kualitas pelaporan keuangan: kajian teoritis dan empiris*. Jakarta: Kencana.

Yuhanis Ladewi. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktek.* Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.